

PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP LINGKUNGAN BUDAYA NASIONAL¹

Hendra Nurtjahjo²

The implementation and actualization of democracy in various surfaces of the globe are perceived to prosper the political culture of all mankind. Nonetheless, the prosperity keeps dark sides when seen in a narrower scope i.e. several indigenous cultures. Democracy has undergone shifts of paradigms throughout history. This article explores several effects of democracy to cultural life and various issues around them. Some solutions thus are offered in order to formulate a sound policy that is culturally accountable.



Pendahuluan

Kenyataan membuktikan, dalam pembukaan millenium ini demokrasi tetap merupakan hasil budaya dan pemikiran politik manusia yang unggul dan mengagumkan. Penerapan dan aktualisasi demokrasi dalam berbagai belahan dunia dirasakan telah membawa kemajuan dalam kehidupan budaya berpolitik umat manusia. Namun, dibalik semua itu juga membawa kerumitan masalah bagi banyak lingkungan budaya. Demokrasi mengalami pergeseran makna dan pemahaman dalam sejarah kehidupan manusia. Pada awalnya demokrasi merupakan sistem politik untuk kepentingan pemilihan langsung dari segelintir manusia yang hidup

¹ Makalah ini disampaikan untuk bahan Diskusi Intern Dosen tentang Demokrasi di Moot Court FH UI Depok.

² Staf Pengajar FH UI Depok. Mengajar pada bagian Dasar-dasar Ilmu Hukum : mata kuliah Ilmu Negara, dan juga pada bagian Hukum Tata Negara : Mata kuliah HAM, Lembaga Kepartanian dan Ormas, Kekuasaan Kehakiman, dan LPR.

dalam negara kota (*city state*), namun kemudian cenderung berubah menjadi pengaturan kekuasaan politik dalam sebuah negara-bangsa yang luas (*nation states*) yang amat kompleks dan berlaku dalam banyak lingkungan budaya, serta menjadi kekuatan yang menentukan tingkah laku budaya dan corak pergaulan masyarakat.³

Pembangunan nasional juga dipersepsi sebagai langkah demokratisasi dan modernisasi. Saat ini tergantung pada para wakil rakyat dan kekuatan *civil society*, model demokrasi yang bagaimana yang akan di-*setting* dalam konteks kebudayaan bangsa Indonesia dan bagaimana merumuskan kedudukan yang tepat bagi demokrasi dalam proses pembangunan yang tengah dilakukan.

Tulisan ini bertujuan membahas dampak demokrasi terhadap kehidupan budaya dan permasalahan yang muncul.⁴ Agar solusi dan langkah penanganan kebijakan selanjutnya dapat dirumuskan secara bertanggung jawab, maka pembahasan tentang fungsi kebudayaan itu sendiri perlu dilakukan. Dengan demikian akan terungkap perbedaan-perbedaan antara pemahaman demokrasi universalis dan wawasan ideologis berdasarkan Pancasila (demokrasi *a la* Indonesia).

A. Kebudayaan

Pertama-tama kita perlu memahami bagaimana pengertian kita tentang kebudayaan dan kemudian pengertian mana yang kita pakai sebagai batasan dalam memakai istilah 'kebudayaan' itu. Dengan batasan pengertian yang kita pilih itu kita mendapatkan lingkup permasalahan dan ukuran yang dibutuhkan untuk menilai gejala dan pengaruh demokrasi dalam kehidupan masyarakat, masyarakat dalam konteks Indonesia pada khususnya.

Pengertian kebudayaan dapat kita kenal dari isinya dalam setiap budaya di dunia. Unsur-unsur universal itu, yang sekalian merupakan isi

³ Lihat gambaran lengkap mengenai sejarah demokrasi dalam tulisan David Held, *Models of Democracy*, part I: Classic Models (Athens), Stanford University Press, California, 1987.

⁴ Dalam tulisan ini, penulis menyajikan pembahasan mengenai dampak demokrasi dengan mengacu pada kerangka pembahasan yang dilakukan oleh Prof. Soerjanto Poespwardojo ketika membahas soal teknologi dalam bukunya 'Strategi Kebudayaan' yang diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta, tahun 1989. Demokrasi memang tidak dapat secara spesifik dianalogikan dengan demokrasi, namun ada beberapa dampak yang secara *significant* nampak ber-irisan dan saling mengisi satu sama lain.

dari semua kebudayaan adalah : (1) Sistem religi dan upacara keagamaan (2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) Sistem pengetahuan, (4) Bahasa, (5) Keseniaan, (6) Sistem matapencaharian hidup, (7) sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur universal tersebut masing-masing dapat dipecah lagi ke dalam sub-unsur- unsurnya. Susunan tata urut dari unsur-unsur kebudayaan universal seperti tercantum tersebut dibuat dengan sengaja untuk sekalian menggambarkan unsur-unsur mana yang paling sukar berubah atau kena pengaruh kebudayaan lain. Dalam tata urut itu akan segera terlihat bahwa unsur-unsur yang berada di bagian atas dari deretan, merupakan unsur-unsur yang lebih sukar berubah daripada unsur-unsur yang tersebut kemudian.⁵ Koentjaraningrat kemudian juga menyebutkan bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, ialah : (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁶ Ketiga wujud kebudayaan itu, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu sama lain. Kebudayaan ideel dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya.⁷

Arti kebudayaan dapat dilihat pula dari tiga persepsi.⁸ Persepsi pertama, cenderung melihat kemajuan dalam bentuk benda (material) objektif (Tylor). Persepsi kedua melihat kebudayaan bukan sebagai kata benda, melainkan sebagai *kata kerja*. Kebudayaan bukan sekedar merupakan koleksi barang-barang budaya, melainkan kegiatan manusia yang menciptakan alat-alat kerja, yang senantiasa memberikan wujud baru pada pola-pola kebudayaan yang ada. Persepsi kedua ini cenderung melihat kemajuan dalam bentuk perkembangan subyektif. Bukan saja hasil pembangunan yang dianggap penting, melainkan juga cara-cara pelaksanaan pembangunan akan menentukan kualitas budayanya. Persepsi

⁵ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta, 1984. Hal. 2-3.

⁶ *Ibid.*, hal. 6

⁷ *Ibid.*, hal. 7

⁸ Poespowardojo, Soerjanto. *Strategi Kebudayaan : Suatu Pendekatan Filosofis*. Gramedia, Jakarta. Hal. 64-65

ketiga melihat kebudayaan sebagai strategi (Van Peursen). Kebudayaan adalah suatu proses yang perlu dikelola dan diarahkan. Di sini manusia secara sadar mencoba mencampuri perkembangan kebudayaan agar berjalan sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bermakna dan baik. Dalam kebudayaan, manusia tidak hanya berusaha mengidentifikasi bagaimana sifat sesuatu, melainkan menentukan bagaimana *seharusnya* sifat sesuatu atau perbuatan yang dilakukan.⁹ Ketiga persepsi itu tidak perlu dianggap sebagai alternatif yang harus dipilih secara terpisah, melainkan tiga aspek dan fungsi kebudayaan yang relevan untuk diperhatikan dalam *membahas dampak demokrasi* dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan *pengertian kebudayaan nasional* bukan menyangkut masalah cita-cita saja, mengenai suatu kebudayaan kesatuan yang kita bayangkan untuk kelak kemudian hari, melainkan adalah suatu masalah yang amat nyata. Hal itu disebabkan karena masalah kebudayaan nasional menyangkut masalah kepribadian nasional, dan masalah kepribadian nasional itu tidak hanya langsung mengenai identitas kita sebagai bangsa, tetapi juga menyangkut tujuan kita bersama untuk hidup sebagai bangsa, dan menyangkut soa motivasi kita untuk membangun.¹⁰ Tentu saja setiap kebudayaan terwujud dan berkembang dalam kondisi tertentu. Adapun kebudayaan nasional itu pada hakikatnya berkaitan dengan eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia. Namun, secara formal kebudayaan nasional berfungsi untuk menjaga kelestarian eksistensi bangsa dengan menumbuhkan identitas, mendorong integrasi nasional, serta memberikan dinamika kehidupan bangsa. Dengan memperhatikan ketiga fungsi tersebut di atas, kebudayaan nasional seharusnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kebijaksanaan untuk pembangunan bangsa termasuk proses pelaksanaannya.¹¹

B. Persepsi Budaya terhadap Demokrasi

Sebenarnya demokrasi selalu dikaitkan dengan ilmu politik, karena pada dasarnya demokrasi adalah penerapan dari ilmu yang menata kekuasaan (politik) yang didasarkan atas dimensi kedaulatan rakyat.

⁹ Ibid., hal. 65

¹⁰ *Op. Cit.*, Koentjaraningrat, hal. 107.

¹¹ *Loc. Cit.*, Soerjanto Poespowardojo, hal. 65.

Sehingga, dapatlah dipahami bahwa demokrasi hanya akan berkembang sejauh didukung oleh *sikap-sikap budaya* yang mampu memberikan kondisi yang mengimbanginya. Dengan demikian, masuknya ide demokrasi barat ke masyarakat Asia memerlukan *proses penyesuaian budaya*. Secara historis, gagasan demokrasi datang ke Indonesia sejak zaman pergerakan kemerdekaan dengan tujuan untuk menghapuskan kekuatan penjajahan (kolonialisme Belanda). Proses ini berjalan terus hingga terjadinya perdebatan pemikiran politik tentang dasar negara terjadi dalam rapat-rapat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Perdebatan pemikiran politik untuk lepas dari penjajahan dan masuk ke alam kemerdekaan dan pembangunan, menunjukkan kesadaran bahwa kemajuan bangsa di masa depan menuntut *sikap-sikap budaya baru* secara mendasar. Dalam perdebatan pemikiran tentang format negara terdapat dua pandangan yang berbeda yang frontal.¹² Pandangan pertama diwakili oleh Soepomo yang menghendaki suatu dasar negara integralistik yang meletakkan kekuasaan negara sebagai puncak pengaturan hidup berbangsa. Hal ini dipandang oleh banyak ahli tatanegara sebagai upaya untuk menghidupkan budaya politik negara kekuasaan (*Machtstaat*) yang didasarkan atas teori kedaulatan negara. Sedangkan pandangan kedua, diwakili oleh Moh. Hatta yang menghendaki terbentuk suatu negara hukum (*Rechtsstaat*) yang didasarkan atas operasionalisasi prinsipil dari teori kedaulatan rakyat.¹³

Perbedaan pandangan ini kiranya dapat ditelusuri dari adanya perbedaan persepsi karena *background* budaya lokal dari kedua tokoh tersebut. Dr. Mochtar Naim dari Universitas Andalas dalam seminar tentang disiplin nasional, menguraikan hubungan yang saling berlawanan, saling bertolak belakang antara pola Minangkabau dan Jawa. Budaya Jawa (yang direpresentasi pemikiran Soepomo) berorientasi vertikal, hirarkis sentripetal dan sinkretis. Sedangkan pola budaya Minang (yang direpresentasi Hatta) berorientasi horisontal, egaliter, sentrifugal, dan

¹² Lihat naskah perbincangan para *founding fathers* Indonesia dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945*. Tim Penyunting : Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati Sinaga, dan Ananda B. Kusuma (ed.al), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1992.

¹³ Lihat pidato Moh. Hatta, *Menuju Negara Hukum*, ketika mendapat gelar kehormatan sebagai Doctor Honoris Causa dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Agustus 1975.

sintetis.¹⁴ Pada karakter budaya yang tersebutkan itu nyata terlihat, tanpa bermaksud mendiskreditkan, bahwa konsepsi budaya Jawa seperti itu adalah konsepsi kekuasaan yang anti-demokrasi, berbeda dengan pola budaya Minang yang lebih mendukung *circumstances* demokrasi.

Pola-pola budaya lokal (di seluruh Indonesia) yang mengarah ke kutub budaya Jawa bukan saja lebih banyak jumlahnya, tetapi juga lebih dominan, karena struktur dan sistem budaya di Indonesia sejak lama banyak yang telah ber-orientasi pada pola-pola seperti yang secara sempurna diperlihatkan oleh pola budaya Jawa. Masyarakat-masyarakat yang tergolong pada kelompok budaya Minang yang horisontal-egaliter sentrifugal dan sintetis, lebih sedikit dan tidak dominan, dan mereka umumnya adalah masyarakat kesukuan (tribal) yang tidak mengenal dalam sejarah sosial mereka hubungan struktural yang hirarkis (vertikal). Bangunan yang ada secara tradisional lebih merupakan bentuk "republik desa".¹⁵ Kutub pola budaya demokratis seperti budaya Minang ini lebih sedikit ketimbang pola budaya Jawa yang berkesan feodalistik. Jadi, sosialisasi pola-pola yang anti-demokratis jauh lebih kental masuk dalam lingkungan kebudayaan nasional Indonesia.

Perdebatan pemikiran politik dan budaya pada hakikatnya menunjukkan kesadaran bahwa kemajuan bangsa di masa depan menuntut *sikap-sikap budaya baru* secara mendasar. Sudah semestinya kita menempatkan permasalahan dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai proses akulturasi. Kesadaran yang harus dibongkar adalah bahwa struktur masyarakat feodal-lah yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia berkembang untuk mencapai demokrasi. Struktur ini diperparah lagi dengan tambahan rekayasa kolonial Belanda untuk mempertahankan politik *de vide et impera*-nya. Pola budaya yang menerapkan kekuasaan tidak terbuka, struktur vertikal yang menempatkan pemimpin pada puncak piramida kekuasaan, menolak kritik dan koreksi dari bawahan (baca : rakyat, masyarakat), sikap ABS (Asal Bapak Senang) meluas pada bawahan, senang dipuji-puji dan disembah-sembah. Semuanya ini menjurus pada sikap tidak rasional atau kurang rasional menghadapi perkembangan tertentu.¹⁶ Dan semuanya ini pula tidak bersesuaian dengan budaya demokratis yang horisontal dan egalitarian.

¹⁴ Lubis, Mochtar. *Transformasi Budaya untuk Masa Depan*. CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988. Hal. 32

¹⁵ Ibid., hal. 32

¹⁶ Ibid., hal. 33

Menyadari keadaan faktual dalam lingkungan kebudayaan nasional yang sedemikian rupa, maka diperlukan langkah-langkah *transformasi budaya yang arif*. Hal ini penting dalam menyikapi perlunya iklim demokratis guna membawa bangsa kita ke hari depan yang penuh tantangan, dengan sebesar mungkin sikap ilmiah, rasional, kesediaan menerima kritik, dan egaliter, agar terbuka kemungkinan mengeluarkan pikiran-pikiran alternatif lewat proses kreatif yang bebas oleh sebanyak mungkin orang dalam struktur yang benar-benar demokrasi Pancasila.¹⁷

C. Dampak Implementasi Gagasan Demokrasi dalam Perspektif Pancasila

Pada faktanya demokrasi adalah suatu kekuatan yang berperan cukup besar dalam pembangunan bangsa. Sebab, sebagaimana teknologi, demokrasi tidak berdiri di samping manusia, melainkan masuk dalam kehidupan manusia, dengan menentukan caranya berpolitik secara sehat, dan dengan demikian ikut mengatur cara dan pola tingkah lakunya. Dengan kehidupan politik itu, manusia dapat memberikan arti baru pada kenyataan politik ataupun memberikan perspektif baru kepadanya, yaitu perspektif etis.

Demokrasi pada hakikatnya adalah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara yang menempatkan suara rakyat mayoritas yang bebas dan berkesamaan hak menjadi penentu dalam suatu proses politik. Demokrasi mencoba mengintrodusir substansi etis ke dalam lingkup teoritiknya, agar legitimasinya meluas tidak hanya pada legitimasi sosiologis (melalui prinsip mayoritas), melainkan juga mencapai legitimasi etis. Dengan kata lain, demokrasi ingin mengawinkan (konvergensi) antara fenomena politik dengan fenomena moralitas (etika), etika dasar, nilai universal. Ciri khas cita-cita demokrasi adalah kekuasaan terpusat pada rakyat yang bebas dan berkesamaan hak. Pada sifat ini demokrasi melahirkan karakter budaya yang egalitarian, terbuka, *mempertluas lingkup kebebasan dalam segala bidang agar manusia dapat mengembangkan potensinya seluas-luasnya*. Dalam artian tersebut terlihat fenomena liberalisme yang cenderung mengartikan kebebasan tanpa perlu restriksi dari nilai apapun, tak terkecuali agama. Sehingga, ada persepsi *simple*

¹⁷ Ibid., hal. 34

yang seolah menegaskan bahwa demokrasi terbaik hanyalah demokrasi liberal, yang membebaskan segalanya.

Ada kesulitan besar ketika kebanyakan orang menyamakan demokrasi liberal itu dengan nilai-nilai universal, dan menghadapkannya dengan kekhususan budaya bangsa yang mengadaptasi demokrasi itu sebagai kebudayaan lokal. Dalam kasus Indonesia, demokrasi liberal berhadapan dengan demokrasi Pancasila, sebagai representasi dari berhadapannya dan (seolah) keharusan kita untuk memilih antara : kemanusiaan universal dengan nilai-nilai universal lainnya atau kebudayaan khusus kita sendiri yang lalu diandaikan *tidak universal* ?¹⁸ Jawabannya diutarakan secara lugas oleh Magnis-Suseno :

"Rupa-rupanya disini ada kerancuan. Nilai-nilai universal kemanusiaan, justru karena universal, tidak merupakan alternatif atau saingan terhadap sebuah kebudayaan tertentu. Nilai-nilai itu sendiri tidak merupakan sebuah kebudayaan melainkan selalu terungkap melalui kebudayaan-kebudayaan tertentu yang tidak pernah universal : *nilai-nilai universal dalam pelbagai kebudayaan*. Itulah kekhasan manusia. Manusia sama martabatnya sebagai manusia, justru dalam pluralitas budaya, pendekatan, pikiran." (huruf miring dari penulis).

Apa yang dapat dicerna dari uraian tersebut adalah bahwa tidak setiap kebudayaan dengan sendirinya mengejawantahkan nilai-nilai universal kemanusiaan itu. Baik demokrasi Pancasila maupun demokrasi liberal, dapat kurang dan dapat pula lebih dalam mewadahnya. Mutu kemanusiaan setiap kebudayaan jelas berbeda, demikian pula dengan mutu kemanusiaan di setiap model demokrasi. Ada model demokrasi di mana martabat manusia terungkap dengan cukup memuaskan, ada juga demokrasi-demokrasi (misalnya yang feodalistiknya kental) di mana orang kecil tidak diakui sebagai manusia.¹⁹

Oleh karena itu, kiranya tidak ada pertentangan atau persaingan antara kebudayaan lokal tertentu dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi, bukan pertentangan tetapi pertemuan antara prinsip demokrasi universalis dengan wawasan ideologis berdasarkan Pancasila (demokrasi ala Indonesia) yang menjadi tujuan dari strategi kebudayaan kita dalam

¹⁸ Pertanyaan ini diajukan Magnis secara retorik dalam bukunya, *Filsafat Kebudayaan Politik : Butir-butir Pemikiran Kritis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. Hal 44.

¹⁹ Dalam hal ini demokrasi dapat dianalogikan dengan kebudayaan. Lihat tulisan Magnis, *Filsafat Kebudayaan Politik*, hal. 44.

bidang politik. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran adanya dampak gagasan demokrasi liberal terhadap kebudayaan lokal Indonesia secara berlebihan.

Demokrasi Pancasila sebagai khas demokrasi Indonesia, pada dasarnya adalah juga menganut prinsip eksistensial demokrasi yang ada dimanapun di dunia ini. Namun, gencarnya prinsip kebebasan yang seluas-luasnya (demokrasi barat) telah menabrak kandungan nilai-nilai luhur yang ada sebagai derivatif dari wawasan ideologis Pancasila. Jika demokrasi liberal dinyatakan secara kondisional adalah mengandung sifat sekularistik, lain halnya dengan demokrasi Pancasila yang bersifat religius, dalam arti mengakui nilai-nilai ke-Tuhanan sebagai nilai pembatas dari kehendak rakyat mayoritas. Tidak hanya itu, aspek nilai-nilai universal, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana disebutkan di atas juga sebagai *conditioning* bagi implementasi demokrasi dalam hidup bernegara bangsa Indonesia. Implementasi demokrasi juga tidak semestinya dapat merusak persatuan bangsa Indonesia yang telah membangun *nation-state* ini dengan susah payah, melainkan seharusnya memperkuat rasa persatuan itu. Walaupun memang harus diakui dampak berlakunya budaya demokratis itu melahirkan tingkat kompetisi kolektif dan individual yang semakin tinggi dan dapat berpuncak pada perpecahan bila konflik tak dapat lagi dikendalikan.

Ada hal penting yang diungkapkan oleh Magnis-Suseno berkenaan dengan masalah dalam semua kebudayaan. Yang menjadi masalah – sehingga kebudayaan pun lalu tercemar dan perlu dimurnikan – pada umumnya segala macam struktur kekuasaan yang tidak adil. Kepentingan ketidakadilan itulah yang memasukkan unsur-unsur buruk ke dalam kebudayaan.²⁰ Dalam hal ini demokrasi dapat menjadi alat, setidaknya mendekati, untuk menjelamkan keadilan sosial yang banyak dicita-citakan. Asumsi kuat dari demokrasi untuk dapat mencapai keadilan adalah bahwa 'yang diperintah' adalah juga 'yang memerintah'. Sehingga, tidaklah mungkin 'rakyat' yang memerintah untuk dirinya sendiri itu berlaku tidak adil bagi dirinya sendiri. Pemikiran simplistis seperti ini tidak pernah akan bisa menjelamkan keadilan sosial yang sebenarnya. Apa

²⁰ Ibid., hal. 45

yang perlu dibenahi adalah akar masalah model institusionalisasi dan operasionalisasi demokrasi yang dicanangkan. Hal yang *significant* untuk dibenahi adalah struktur dan mekanisme rekrutmen : lembaga perwakilan, lembaga kepresidenan, sistem pemilihan umum (pemilu), hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah, dan karakter birokrasi yang tidak demokratis. Tidak hanya itu aspek demokrasi dalam bidang ekonomi juga harus dicanangkan. Mekanisme produksi, distribusi, dan pengaturan cara-cara berusaha yang adil harus terus diperbaiki. Hal ini memutlakkan perlunya reformasi konstitusi yang sistemik dan akuntabel. Semuanya ini butuh keteladanan dan reformasi sistemik yang melibatkan restorasi dan transformasi budaya yang bertahap dan terencana.

Penutup

Bagaimanapun juga pengaruh gagasan demokrasi terhadap lingkungan budaya nasional tetap memberikan nilai positif dalam arti gagasan tentang kemerdekaan hidup (bukan dalam pengertian kebebasan *an sich*). Setidak-tidaknya mutu kemanusiaan kita dalam relasi kekuasaan yang beradab dapat meningkat secara bertahap. Tahapan ini juga membutuhkan *conditioning* dan penyesuaian yang perlahan tapi pasti, menuju kematangan budaya demokratis itu sendiri. Kematangan budaya demokratis itu tidak bisa hanya dilihat dari munculnya kebebasan pergaulan hidup dan jaminan politik mengemukakan pendapat, melainkan dari wujudnya keadilan sosial dalam kenyataan. Demokrasi akan terus berperan tanpa ada penentangan yang berarti dalam kehidupan budaya yang terus berjalan sepanjang sejarah. Namun demokrasi juga pasti akan rusak dan punah, dan hanya Allah jualah penentu segala-galanya.

Daftar Pustaka

- Bahar, Saafroedin., Nannie Hudawati Sinaga, Ananda B. Kusuma (ed.al). *Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta : Sekretariat Negara RI, 1992.

- Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dodd, C.H., *Pembangunan Politik*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Gould, Carol C., *Demokrasi Ditinjau Kembali*. (terjemahan dari *Rethinking Democracy*), Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993.
- Jacob, Teuku, ed., *Semangat Kecendikiaan Menggalang Perdamaian Dunia: Polemologi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Kartasmita. Ginanjar, et al., *Demokrasi dan Budaya MEP: Peluang Dan Tantangan PJP II di Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial Budaya*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1995.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1984.
- Latief, M. Syahbuddin, ed., *Jalan Kemanusiaan : Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Laperia Pustaka utama, 1999.
- Lubis, Mochtar, *Transformasi Budaya Untuk Masa Depan*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Magnis Suseno, Franz, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Poespowardojo, Soerjanto. *Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya: Sebuah Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1993.
- Poespowardojo, Soerjanto. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Rasjidi, H.M., *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Sutrisno, Slamet, ed., *Tugas Filsafat Dalam Perkembangan Budaya*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- To Thi Anh, *Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflik atau Harmoni?*. Jakarta: PT. Gramedia, 1984.
- Van Peursen, C.A., *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976.